

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab IV ini Penulis akan menyajikan Gambaran Umum Obyek/Subyek yang meliputi kondisi Geografis, kondisi ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, kondisi penanaman modal dan pengeluaran pemerintah.

Maluku merupakan salah satu provinsi di kawasan Timur Negara Republik Indonesia yang memiliki posisi strategis, karena kedudukannya berada antara sebagian wilayah barat dan tengah Indonesia dengan Papua di bagian Timur, serta menjadi penghubung wilayah selatan yakni Negara Australia dan Timor Leste dengan wilayah Utara yaitu Maluku Utara dan Sulawesi. Selain itu, provinsi Maluku berada pada jalur lintas Internasional yaitu dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisi ini mempunyai arti yang sangat strategis di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.

A. Kondisi Geografis Provinsi Maluku

Secara geografis, Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, Provinsi Papua Barat di bagian Timur, Negara Timor Leste dan Negara Australia di bagian selatan, serta Provinsi Sulawesi Tenggara di bagian dan Sulawesi Tengah di bagian Barat. Sedangkan secara astronomi, Provinsi Maluku terletak antara 2°30' - 8°30' LS dan 123° - 135°30' BT.

Iklim di wilayah kepulauan Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim, yang disebabkan oleh kondisi kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan. Berdasarkan data klimatologi hasil pencatatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika di Provinsi Maluku, maka suhu rata-rata di Provinsi Maluku tahun 2012 adalah 26,7°C dengan curah hujan 264,4 mm.

Sebagian daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 km², terdiri dari 92,4% dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 pulau dan panjang garis pantai 10.662 km. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku terdiri atas 9 Kabupaten dan 2 Kota dengan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku.

Provinsi Maluku terbagi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota dengan masing-masing luas wilayah terdiri dari :

- a. Kabupaten Maluku Tengah dengan luas wilayah 7,953.81 km²
- b. Kabupaten Maluku Tenggara dengan luas wilayah 1,031.81 km²
- c. Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan luas wilayah 4,465.79 km²
- d. Kabupaten Buru dengan luas wilayah 4,932.32 km²
- e. Kabupaten Seram Bagian Timur dengan luas wilayah 6,429.88 km²
- f. Kabupaten Seram Bagian Barat dengan luas wilayah 5,033.38 km²
- g. Kabupaten Kepulauan Aru dengan luas wilayah 8,152.42 km²
- h. Kabupaten Maluku Barat Daya dengan luas wilayah 4,581.06 km²
- i. Kabupaten Buru Selatan dengan luas wilayah 3,780.56 km²

- j. Kota Ambon dengan luas wilayah 298.61 km²
- k. Kota Tual dengan luas wilayah 254.39 km²

Dari data di atas, maka Kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Kepulauan Aru dan Kabupaten dengan luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan Kota dengan luas wilayah terbesar adalah Kota Ambon dan Kota dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Tual.

B. Ketenagakerjaan Provinsi Maluku

Jumlah penduduk Provinsi Maluku tahun 2010 mencapai 1.475.070 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,14% jumlah tersebut mendiami wilayah seluas 54.185 km², yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota se Provinsi Maluku dengan kepadatan penduduk 27 jiwa per km².

Dari sisi tenaga kerja, jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku pada Tahun 20010 mencapai 596.030 orang, yang bekerja sebanyak 533.015 orang (89,43%) dan sisanya yaitu 10,57% merupakan pencari kerja. Apabila dibedakan menurut lapangan pekerja utama, maka persentase terbesar penduduk Provinsi Maluku bekerja pada Sektor Pertanian yaitu sebesar 56,28%, kemudian Sektor Jasa dan Sektor Perdagangan masing-masing sebesar 13,57% dan 12,63%.

C. Kondisi Perekonomian Provinsi Maluku

Secara makro ekonomi, kondisi perekonomian Maluku cenderung membaik setiap tahunnya. Salah satu indikatornya antara lain, adanya peningkatan nilai PDRB. Kondisi perekonomian Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,18% selama kurun waktu tersebut, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku menunjukkan peningkatan secara konsisten. PDRB Provinsi Maluku tahun 2010 atas dasar harga konstan adalah Rp. 3,99 triliun. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku selama lima tahun terakhir, dengan nilai kontribusi rata-rata per tahun 32,56%.

Kondisi geografis Provinsi Maluku bila dilihat dari sisi strategis peluang investasi bisnis dapat diprediksi bahwa sumber daya alam di sektor perikanan dan kelautan dapat dijadikan primadona bisnis di Maluku, selain sektor lainnya seperti pertanian sub sektor peternakan dan perkebunan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta sektor jasa yang seluruhnya memiliki nilai jual dan potensi bisnis yang cukup tinggi

D. Potensi-potensi Sumber Daya di Provinsi Maluku

Luas sumber daya darat di Maluku adalah sebesar 54.185 km², dengan potensi sumber daya hutan :

- a. Hutan Konvesrsi : 475.433 Ha
- b. Hutan Lindung : 774.618 Ha

- c. Hutan Produksi Terbatas : 865.947 Ha
- d. Hutan Produksi Tetap : 908.702 Ha

Adapun daerah penghasil tambang dan mineral di Provinsi Maluku :

- a. Emas : Pulau Buru, Wetar, Ambon, Haruku dan Pulau Romang
- b. Merkuri : Pulau Damar
- c. Perak : Pulau Romang
- d. Logam Dasar : Pulau Haruku dan Nusa laut
- e. Kuarsa : Pulau Buru
- f. Minyak Bumi : Bula (Pulau Seram), Laut Banda, Kepulauan Aru dan cadangan minyak di Maluku Barat Daya
- g. Manggan : Laut Banda

Provinsi Maluku di tetapkan oleh Menteri KKP (Fadel Mohammad) sebagai Lumbung Ikan Nasional 2030 sejak digelarnya Sail Banda 2010. Maluku merupakan kepulauan bahari terbesar di wilayah Nusantara memang layak dijadikan lumbung ikan nasional karena potensi perikanan yang luar biasa banyaknya disertai laut yang kaya dan masih terjaga dari campur tangan manusia.

Sumber daya perairan 658.294,69 km² dengan potensi sebagai berikut :

- Laut Banda : 277.890 ton/tahun
- Laut arafura : 771.500 ton/tahun

- Laut Seram : 590.640 ton/tahun

Berbagai jenis ikan yang ditangkap dan terdapat di Maluku antara lain: ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, cumi. Sementara untuk potensi budidaya laut yang penyebarannya terdapat pada Laut Seram, Manipa, Buru, Kep. Aru, Kep. Kei, Yamdena pulau-pulau terselatan dan wetar adalah kakap putih, kerapu, rumput laut, tiram, mutiara, teripang, lobster dan kerang-kerangan. Untuk potensi budidaya payau adalah bandeng dan udang windu.

E. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan Investasi di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, dengan bentangan laut yang sangat luas menyimpan kekayaan berbagai jenis biota, serta daratan yang menyimpan kekayaan sumberdaya alam berlimpah. Namun sebagian besar dari sumberdaya tersebut belum tersentuh dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Rendahnya realisasi investasi disebabkan karena beberapa kendala yang merupakan hambatan, antara lain kondisi geografis daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, terbatas dan belum memadai infrastruktur pendukung kegiatan investasi, terbatasnya kualitas sumberdaya manusia, sulitnya memperoleh lahan disebabkan karena status kawasan hutan di Kabupaten/Kota, terbatasnya pasokan listrik untuk kegiatan investasi dan

socio-culture masyarakat setempat yang belum menerimamasuknya investasi, sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi tentang pentingnya investasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan

Untuk mengatasi kendala yang menjadi hambatan investasi, maka kebijakan yang dibentuk oleh Pemda, antara lain adalah percepatan pembangunan dan penyiapan infrastruktur penunjang kegiatan investasi, menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif di daerah, memberikan pelayanan perijinan penanaman satu pintu, mengembangkan sumberdaya manusia, baik pelaku pemerintah maupun pelaku usaha daerah, melaksanakan efektifitas kegiatan pelaksanaan promosi investasi dalam dan luar negeri, pelayanan informasi melalui internet, sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah, serta meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di daerah.

Tabel 4.1
Perkembangan Investasi

Tahun	Investasi	
	Formal	Non formal
2010	49.496.693	19.829.728
2011	48.508.093	19.302.078
2012	47.694.393	18.814.078
2013	46.090.393	18.146.078
2014	46.244.393	17.951.078

Sumber : BPS Maluku Dalam Angka

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Perkembangan Investasi di Provinsi Maluku secara Formal tahun 2011 perkembangan formal mengalami kenaikan sebesar 0,01 % dari tahun 2010. Lain halnya dengan perkembangan perusahaan pada sektor non formal, pada tabel di atas dapat dilihat adanya persentase atau jumlah yang tinggi pada tahun 2010 dan nilai terendah pada tahun 2013.

Lain halnya pada perkembangan sektor Informal, pada table diatas dapat dilihat adanya persentase/ jumlah yang tinggi pada Tahun 2010. Nilai perkembangan perusahaan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu senilai 0,71 %.

2. Perkembangan Tingkat Upah di Provinsi Maluku

Upah minimum berlaku bagi setiap pekerja lajang, non skill, yang berstatus ttidak tetap, tetap, harian lepas, masih dalam masa percobaan, jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Bagi para pekerja diluar ketentuan di atas besarnya upah harus lebih tinggi dari Upah Minimum disesuaikan dengan struktur dan skala upah yang sesuai dan berlaku.

Tabel 4.2
Perkembangan Tingkat Upah

Tahun	Tingkat Upah
2010	Rp. 840,000
2011	Rp. 900.000
2012	Rp.975.000

Tahun	Tingkat Upah
2013	Rp.1.275.000
2014	Rp.1.415.000

Sumber : BPS Maluku Dalam Angka

Dari tabel diatas adapat dilihat tingkat upah tahun 2010 hingga 2014 provinsi Maluku. Tingkat Upah pada setiap Kabupaten/Kota memiliki Perbedaan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2010 Tingkat Upah Provinsi Maluku sebesar 840.000 dan meningkat 0,88 % pada Tahun 2011 hingga 2014.

Dari table di atas dapat dilihat Tingkat Upah tahun 2010 hingga 2014 Provinsi Maluku yang di tetapkan Oleh Gubernur Maluku. Tingkat upah pada setiap Kabupaten Kota memiliki perbedaan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena kebutuhan setiap kabupaten yang berbeda-beda.

3. Perkembangan Inflasi di Provinsi Maluku

Dalam ekonomi, inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara terus menerus. Tingkat inflasi diukur dengan perubahan dalam indeks harga konsumen . Di Maluku inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menyebabkan produksi turun dan penawaran total (aggregate supply) berkurang yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan biaya produksi dapat berasal dari kenaikan bahan baku industri, perjuangan serikat buruh yang berhasil menuntut kenaikan upah dan lain-lain. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi

Tabel 4.3
Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku

Tahun	Inflasi
2010	8,78
2011	2,85
2012	6,73
2013	8,81
2014	6,81

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan tabel diatas Inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,81 % hal itu terjadi di karenakan pemerintah mengajukan kenaikan harga bahan bakar namun kegelisahan sosial dan oposisi politik di parlement menyebabkan peningkatan harga. Selain itu, fenomena tersebut dapat menyebabkan terciptanya biaya-biaya ekonomi, seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi di Negara ini (Domestik dan Internasional) dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainnya. Selain itu, tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,85 %.

4. Perkembangan PDRB di Provinsi Maluku

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di maluku selama kurun waktu 2010-2012 cenderung meningkat, yang menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan di Provinsi Maluku walaupun masih jauh dari rata-rata Nasional pada periode tersebut. Jika pada tahun 2010 rasio antara PDRB per kapita Maluku dan PDB Nasional sebesar 41,53 persen, maka pada tahun 2014 rasionya meningkat

menjadi 45,12 persen. Apabila pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, ini menunjukkan kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Maluku. Tantangan yang di hadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.4
Perkembangan PDRB

Kabupaten	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Maluku Tenggara Barat	9,27	9,84	10,46	10,91	11,47
Maluku Tenggara	12,04	12,71	13,53	14,29	15,13
Maluku Tengah	9,73	10,20	10,87	11,32	12,03
Buru	8,74	8,93	9,11	9,22	9,49
Kep. Aru	15,93	16,50	17,51	18,26	19,24
Seram Bagian Barat	7,21	7,58	8,02	8,35	8,82
Seram Bagian Timur	13,25	14,12	14,42	14,63	15,60
Maluku Barat Daya	8,55	9,03	9,63	10,15	11,66
Kabupaten Buru Selatan	9,93	10,18	10,52	10,87	11,35
Kota Ambon	17,71	18,17	18,86	19,17	19,50
Kota Tual	15,03	15,45	16,19	16,63	17,18

Sumber : BPS Maluku Dalam Angka

Dari table diatas, dapat dilihat adanya perbedaan nilai PDRB dari masing-masing Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku nilai terbesar terdapat pada Kota Ambon, hal ini disebabkan karena tingkat produktifitas yang tinggi, dan Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PDRB lebih sering mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya tingkat produktifitas masyarakat di Kepulauan Maluku yang semakin hari semakin bertambah.